

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia seutuhnya, sudah seharusnya memiliki atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam pembangunan (subyek), dengan implikasi bahwa pemerintah (birokrasi) lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam membangkitkan kreativitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan *Self Sustaining Capacity*, yaitu dengan menerapkan model perencanaan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana. Guna mengimplementasikan tugas-tugas tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja), yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, telah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK), diawali dengan penghimpunan berbagai usulan yang bersumber dari usulan dari masyarakat melalui media Musrenbang. Setiap usulan yang berasal dari masyarakat, dijadikan sebagai dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang. Setelah pelaksanaan penghimpunan usulan masyarakat tersebut terkumpul, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Tim tersebut mempunyai tugas menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja), hingga menjadi Rancangan Akhir Renja Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap melalui media rapat Tim yang dilakukan secara intensif.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, didasarkan pada: (1) Visi dan Misi Kabupaten Malang Madep Manteb Manetep; (2) indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; (3) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, karena Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 yang sebelumnya dipadang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan strategis dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. Pada perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, terdapat perubahan pada beberapa indikator kinerja, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, sekaligus sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa pembangunan KKBPK merupakan urusan wajib. Artinya, bahwa

penyelenggaraan pembangunan KKBPK harus dilaksanakan, sekaligus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Implementasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas, dengan harapan bahwa setiap keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021, yaitu "Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia".

Beberapa permasalahan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yaitu masih rendahnya kualitas ber-KB karena masih rendahnya kualitas ber-KB, masih tingginya perkawinan usia di bawah 20 tahun, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK. Guna menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya eksisting secara optimal, berdasarkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (*Sustainable*), yang diikuti dengan peningkatan kemudahan akses program, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan pada kenyataannya belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan KKBPK secara menyeluruh. Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan jejaringan pelayanan KB, dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM), TNI, POLRI, PKK, profesi dan komponen masyarakat sebagai wujud pendekatan pembangunan KKBPK di berbagai segmen sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/275/KEP/35.07.013/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, serta analisa capaian kinerja Tahun 2017. Pada sisi lain, Rencana Kerja Tahun 2019 juga memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, yaitu berisi sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2019 sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan KKBPK Tahun 2019.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas pembangunan KKBPK Tahun 2019.
3. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya, yang akan dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan KKBPK.

1.3.2. Tujuan

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan KKBPK antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun antar program.
2. Terjalannya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan KKBPK, guna tercapainya sasaran lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada kemampuan dan prioritas pembangunan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan KKBPK Tahun 2019.
4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Adm. Keuangan;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan;
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah;
- k) Rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c) Pengadaan Mebeleur;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi.

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data;
- b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR);
- c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS);
- d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan;
- e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

7. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi;
- b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR);
- c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi.

8. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
- b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
- c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana.

8. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Bina Ketahanan Remaja;
- b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
- c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

Kode	Urusan/BidangUrusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Th. 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d th 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d th. 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
2.08	URUSAN WAJIB									
2.08.01	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.									
2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08 . 2.08.1 . 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyediaan jasa, alat, koordinasi dan konsultasi	100,00 %	95,88 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	41.000 buah	3.950 buah	3.518 buah	3.518 buah	100,00%	4.000 buah	11.468 buah	27,97%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Jumlah orang yang diberikan honor	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	100,00%	12 ob	12 ob *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Jumlah penyediaan sarana kebersihan	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	100,00%	12 ob	12 ob *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 10	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Jumlah pengadaan alat tulis kantor	32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	100,00%	32 jenis	32 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00%	6 jenis	6 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 12	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jumlah pengadaan komponen instalasi Listrik	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00%	10 jenis	10 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 15	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 17	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11.028 HOK	1.276 HOK	1.276 HOK	1.276 HOK	100,00%	1.276 HOK	3.828 HOK	34,71%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 18	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Jumlah penugasan dinas luar daerah	700 HOK	75 HOK	40 HOK	40 HOK	100,00%	125 HOK	240 HOK	34,29%
2.08 . 2.08.1 . 01 . 19	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	11 Jumlah penugasan dinas dalam daerah	788 HOK	82 HOK	145 HOK	145 HOK	100,00%	113 HOK	340 HOK	43,15%
2.08 . 2.08.1 . 02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,93 %	95,93%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 02 . 07	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 02 . 09	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100,00%	7 jenis	7 jenis *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 02 . 10	3 Pengadaan Mebeleur	3 Jumlah mebeleur yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	2 jenis	2 jenis *	100,00%

Kode	Urusan/BidangUrusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Th. 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d th 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d th. 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
2.08 . 2.08.1 . 02 . 22	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gdg	1 gdg	1 gdg	1 gdg	100,00%	1 gdg	1 gdg *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 02 . 24	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	149 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100,00%	7 unit	21 unit	14,09%
2.08 . 2.08.1 . 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 03 . 05	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jumlah orang yang mendapat pakaian olahraga	450 stel	-	139 stel	139 stel	100,00%	150 stel	289 stel	64,22%
2.08 . 2.08.1 . 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase sumberdaya manusia yang mendapat pelatihan formal	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	453 orang	51 orang	39 orang	39 orang	100,00%	51 orang	141 orang	31,13%
2.08 . 2.08.1 . 06	PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAP CAPAIAN KINERJA & KEU.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 06 . 01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	24 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100,00%	4 buku	12 buku	50,00%
2.08 . 2.08.1 . 06 . 02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	3 buku	50,00%
2.08 . 2.08.1 . 06 . 04	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	3 buku	50,00%
4.01 . 2.08.1 . 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI.	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 % *	100,00%
4.01 . 2.08.1 . 15 . 01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	2.340 dok	390 dok	390 dok	390 dok	100,00%	390 dok	1.170 dok	50,00%
4.01 . 2.08.1 . 15 . 06	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	50,00%
4.01 . 2.08.1 . 15 . 07	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	50,00%
4.01 . 2.08.1 . 15 . 08	4 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	4 Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	2.340 dok	390 dok	390 dok	390 dok	100,00%	390 dok	1.170 dok	50,00%
	5 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	5 Jumlah Dokumen parameter	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	50,00%
	6 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	6 Jumlah Dokumen mutasi keluarga	6 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	50,00%

Kode	Urusan/BidangUrusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Th. 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d th 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d th. 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
2.08 . 2.08.1 . 17	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	40,00 %	30,78 %	34,61 %	32,58 %	94,13%	36,41 %	36,41 % *	91,03%
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	100,00 %	20,00 %	40,21 %	50,47 %	125,52%	60,00 %	60,00 % *	60,00%
2.08 . 2.08.1 . 17 . 02	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	1 Jumlah peserta KB Aktif	343.625 aks	412.000 aks	414.500 aks	393.878 aks	95,02%	417.000 aks	417.000 aks *	121,35%
2.08 . 2.08.1 . 17 . 04	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.800 orang	760 orang	1.918 orang	1.918 orag	100,00%	2.280 orang	2.280 orang *	60,00%
2.08 . 2.08.1 . 17 . 05	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34.181 PUS	52.633 PUS	49.507 PUS	56.735 PUS	87,26%	44.994 PUS	44.994 PUS *	100,00%
	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	-	87 klinik	87 klinik	100,00%	87 klinik	87 klinik *	90,63%
2.08 . 2.08.1 . 18	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri	69,49 %	26,50 %	38,72 %	38,72 %	100,00%	46,41 %	46,41 % *	66,79%
2.08 . 2.08.1 . 18 . 01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	1 Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	103 orang	151 orang	151 orang	100,00%	181 orang	181 orang *	66,79%
2.08 . 2.08.1 . 18 . 02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media massa	305 orang	-	250 or/keg	285 or/keg	114,00%	260 orang	260 orang *	85,25%
	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	390 orang	390 orang	390 orang	100,00%	390 orang	390 orang *	100,00%
2.08 . 2.08.1 . 16	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	62,26 %	14,29 %	19,05 %	6,19 %	32,49%	23,81 %	23,81 % *	38,24%
2.08 . 2.08.1 . 16 . 01	1 Bina Ketahanan Remaja	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 klp	15 klp	19 klp	19 klp	100,00%	21 klp	21 klp *	84,00%
2.08 . 2.08.1 . 22	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88,15 %	87,00 %	87,00 %	83,80 %	96,32%	87,00 %	87,00 % *	98,70%
2.08 . 2.08.1 . 22 . 01	1 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	1 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	38.866 aks	36.192 aks	36.727 aks	40.564 aks	110,45%	37.262 aks	37.262 aks *	95,87%
2.08 . 2.08.1 . 23	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47,47 %	25,61 %	26,51 %	18,18 %	68,58%	27,38 %	27,38 % *	57,68%
2.08 . 2.08.1 . 23 . 01	1 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 klp	42 klp	44 klp	18 klp	40,91%	46 klp	46 klp *	97,87%
				-						

Keterangan: (*) Perkiraan realisasi didasarkan pada target hasil akhir tahun berjalan

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa capaian kinerja program/kegiatan hingga Tahun 2017 diukur berdasarkan target akhir tahun, yang didasarkan pada target Rencana Kerja Tahun 2017.

Terdapat beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2017 yang belum terpenuhi, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Keluarga Berencana (indikator Persentase Peserta KB MKJP : Target = 34,61%; Realisasi = 32,58%; Capaian = 94,13%)
 - a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi (indikator Jumlah peserta KB Aktif : Target = 414.500 akseptor; Realisasi = 393.878 akseptor; Capaian = 95,02%).
 - b) Kegiatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (indikator Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB) : Target = 49.507 PUS; Realisasi = 56.735 PUS; Capaian = 87,26%).
- 2) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (indikator Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB : Target = 87,00%; Realisasi = 83,80%; Capaian = 96,32%).
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (Indikator Persentase Kelompok UPPKS Mandiri : Target = 26,51%; Realisasi = 18,18%; Capaian = 68,58%).
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (indikator Jumlah kelompok UPPKS Mandiri : Target = 44 kelompok; Realisasi = 18 kelompok; Capaian = 40,91%).

Berdasarkan pada indikator program/kegiatan yang tidak terpenuhi tersebut di atas, dapat berdampak pada:

- 1) Program pelayanan keluarga berencana:
 - Dengan tidak tercapainya indikator Jumlah peserta KB Aktif, jika ditinjau dari aspek pembangunan nasional akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR), sehingga akan mempengaruhi keseimbangan proses pembangunan nasional dan daerah. Ditinjau dari aspek keluarga, akan berpengaruh pada tingkat ketahanan keluarga, baik dari segi materiil dan sprirituil.
- 2) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:
 - Tidak tercapainya indikator persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB, akan berdampak menurunnya ketahanan keluarga balita akibat adanya ketidak seimbangan pemenuhan kebutuhan materiil dan sprirituil.

4) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, pada kegiatan Kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera dengan indikator Persentase Kelompok UPPKS Mandiri.

- Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut, akan berdampak lemahnya pembinaan kegiatan ekonomi produktif pada keluarga, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera, karena tidak adanya wadah kegiatan ekonomi produktif yang mumpuni di masyarakat, sehingga akan menimbulkan lemahnya ketahanan ekonomi keluarga.

Sebagai tindak lanjut untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya-upaya, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pembinaan kepesertaan ber KB.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok BKB melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan mengembangkan kelompok BKB Integrasi.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait.
- 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA) dalam pembangunan KKBPK;
- 5) Mengajukan tambahan tenaga lini lapangan (PKB/PLKB).
- 6) Mengajukan penyediaan anggaran yang proporsional, atau dengan menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang telah melampaui target pada kegiatan yang belum mencapai target.

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2017 yang sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Program/kegiatan Rutin secara keseluruhan indikator kinerja dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik, program tersebut terdapat pada:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 2) Program Pengembangan Data dan Informasi dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada setiap kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain :
 - 1) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data;
 - 2) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR);
 - 3) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS);
 - 4) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK);
 - 5) Pemaduan dan

sinkronisasi kebijakan Kependudukan; 6) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

- 3) Kegiatan Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) dan Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi pada program Program Pelayanan Keluarga Berencana dapat terpenuhi dengan baik sesuai harapan.
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana dapat terpenuhi dengan baik yang didukung oleh kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB dan Penyuluhan Program Keluarga Berencana.
- 5) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat terpenuhi dengan baik, yang ditunjang oleh kegiatan Bina Ketahanan Remaja.

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2017 yang sudah terpenuhi melampaui target, yaitu:

- 1) Indikator Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR) pada Program Pelayanan Keluarga Berencana.
- 2) Indikator Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media massa, pada kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi Massa dalam Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana.
- 3) Indikator Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB, pada kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dalam Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, sehingga berdasarkan analisa perkiraan capaian indikator kinerja program/kegiatan masih belum sesuai dengan harapan target Renstra. Namun, optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan harus ditingkatkan, dengan harapan agar target capaian pada tahun-tahun sebelumnya juga bisa terpenuhi pada tahun berjalan.

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja didasarkan pada hasil perbandingan realisasi capaian program kegiatan terhadap target program/kegiatan renja Tahun 2018. Metode perhitungan pada realisasi capaian program kegiatan, didasarkan pada hasil penjumlahan realisasi capaian awal masa berlakunya Renstra (Tahun 2016) hingga tahun berjalan 2018 (perkiraan capaian), hal ini dikarenakan semua indikator tidak mengalami perubahan (sama).

Hasil evaluasi program/kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra hingga Tahun 2018, dapat diuraikan secara terperinci pada tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Indikator kinerja utama pada Tahun 2017 dan 2018 menggunakan 7 indikator, namun sejak Tahun 2019 indikator utama tersebut dirampingkan menjadi 3 indikator, antara lain:
 - 1) Persentase Peserta KB Aktif;
 - 2) Persentase Kampung KB Aktif;
 - 3) Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar.
2. Indikator Program/kegiatan, terdiri dari:
 - 1) Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
 - a. Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah);
 - b. Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan);
 - c. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB);
 - d. Jumlah petugas kebersihan (OB);
 - e. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis);
 - f. Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis);
 - g. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis);
 - h. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis);
 - i. Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK);
 - j. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK);
 - k. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK);
 - l. Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis);
 - m. Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan).

- 2) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur
 - a. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis);
 - b. Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis);
 - c. Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis);
 - d. Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis);
 - e. Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit);
 - f. Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit);
 - g. Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis).
- 3) Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
 - a. Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel).
- 4) Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
 - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang).
- 5) Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
 - a. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku);
 - b. Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku);
 - c. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku).
- 6) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan
 - a. Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan;
 - b. Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR);
 - c. Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
 - d. Jumlah dokumen parameter;
 - e. Jumlah dokumen mutasi keluarga.
- 7) Persentase Peserta KB MKJP

Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)

 - a. Jumlah peserta KB Aktif;
 - b. Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR);
 - c. Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB);
 - d. Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai.
- 8) Persentase PPKBD Mandiri
 - a. Jumlah PPKBD Mandiri;
 - b. Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik;

- c. Jumlah PPKBD Aktif.
- 9) Persentase BKR Paripurna ;
 - Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB;
 - Persentase Kelompok UPPKS Mandiri.
 - a. Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar;
 - b. Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB;
 - c. Jumlah kelompok UPPKS Mandiri.

Beberapa indikator tersebut diukur berdasarkan indikator target daerah, yang mengacu pada perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator IKU yang telah mencapai target Tahun 2018, yaitu: (1) Persentase Peserta KB Aktif dengan target Renja Tahun 2018 sebesar 67,04%, tercapai sebesar 74,94%; (2) Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar dengan target Renja Tahun 2018 sebesar 6,25%, tercapai sebesar 6,25%. Sedangkan untuk target program kegiatan Tahun 2018 yang telah tercapai, adalah: 1) Persentase Peserta KB MKJP; 2) Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR); 3) Jumlah peserta KB Aktif; 4) Jumlah PPKBD Aktif.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih perlu adanya peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan pada beberapa program/kegiatan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.

Indikator IKU Tahun 2018 yang belum tercapai, adalah indikator Persentase Kampung KB Aktif. Penyebab belum tercapainya indikator tersebut karena pengembangan kampung KB baru dimulai pada Tahun 2016, pada sisi lain bahwa indikator tersebut baru diberlakukan sejak Tahun 2018.

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN MALANG**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Lama Eselon II, terdiri:											
	1 Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan yang update			100%	100%	-	-	100%	0%	-	-	Sudah tidak masuk IKU
	2 Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)			40,21%	60,00%	-	-	34,34%	34,76%	-	-	Sudah tidak masuk IKU
	3 Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri			27,00%	28,00%	-	-	34,62%	39,23%	-	-	Sudah tidak masuk IKU
	4 Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB			72,00%	75,00%	-	-	84,33%	83,07%	-	-	Sudah tidak masuk IKU
	5 Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri			87,00%	87,00%	-	-	15,31%	36,54%	-	-	Sudah tidak masuk IKU
2	Indikator Baru Eselon II, terdiri:											
	1 Persentase Peserta KB Aktif		69,84%	66,06%	67,04%	68,00%	68,94%	75,84%	74,94%	68,00%	68,94%	Sudah Tercapai
	2 Persentase Kampung KB Aktif		90,00%	3,00%	10,00%	25,00%	50,00%	-	-	25,00%	50,00%	Belum Tercapai
	3 Persentase kelompok PIK Remaja Tegar		26,04%	6,19%	6,25%	21,88%	23,96%	6,19%	6,25%	21,88%	23,96%	Sudah Tercapai
3	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	25,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			3.518 buah	4.000 buah	4.000 buah	4.000 buah	3.518 buah	1.948 buah	4.000 buah	4.000 buah	Belum Tercapai
	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3 bulan	12 bulan	12 bulan	Belum Tercapai
	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	3 ob	12 ob	12 ob	Belum Tercapai
	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)			12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	3 ob	12 ob	12 ob	Belum Tercapai
	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	16 jenis	32 jenis	32 jenis	Belum Tercapai
	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	2 jenis	6 jenis	6 jenis	Belum Tercapai
	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	2 jenis	10 jenis	10 jenis	Belum Tercapai
	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	Belum Tercapai
	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			1.276 hok	2.316 hok	2.400 hok	2.400 hok	1.276 hok	319 hok	2.400 hok	2.400 hok	Belum Tercapai
	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			40 hok	100 hok	125 hok	125 hok	40 hok	31 hok	125 hok	125 hok	Belum Tercapai
	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			145 hok	153 hok	160 hok	160 hok	145 hok	28 hok	160 hok	160 hok	Belum Tercapai
	12 Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)			1 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	1 jenis	-	0 jenis	0 jenis	Belum Tercapai
	13 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)			0 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 bulan	-	12 bulan	12 bulan	Belum Tercapai

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	25,58%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			3 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	Belum Tercapai
	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	2 jenis	7 jenis	7 jenis	Belum Tercapai
	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	Belum Tercapai
	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	-	1 gedung	1 gedung	Belum Tercapai
	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			7 unit	9 unit	9 unit	9 unit	7 unit	2 unit	9 unit	9 unit	Belum Tercapai
	6 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)			6 unit	0 unit	6 unit	0 unit	6 unit	-	6 unit	0 unit	Belum Tercapai
	7 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)			0 gedung	29 gedung	29 gedung	29 gedung	0 gedung	-	29 gedung	29 gedung	Belum Tercapai
5	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)			139 stel	50 stel	50 stel	50 stel	139 stel	-	50 stel	50 stel	Belum Tercapai
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			39 org	95 org	100 org	100 org	39 org	-	100 org	100 org	Belum Tercapai
7	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	100%	100%	100%	16,67%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	1 buku	4 buku	4 buku	Belum Tercapai
	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	1 buku	Belum Tercapai
	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	1 buku	Belum Tercapai
8	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan			390 dok	390 dok	390 dok	390 dok	390 dok	-	390 dok	390 dok	Belum Tercapai
	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	4 Jumlah dokumen parameter			0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	-	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga			0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	-	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
9	Persentase Peserta KB MKJP			34.61 %	36.41 %	38.20 %	40.00 %	34.61 %	50,47%	38.20 %	40.00 %	Sudah Tercapai
	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)			40.21 %	60.00 %	80.00 %	89.47 %	40.21 %	74,94%	80.00 %	89.47 %	Sudah Tercapai
	1 Jumlah peserta KB Aktif			288.759 aks	301.874 aks	315.381 aks	329.294 aks	288.759 aks	388.511 aks	315.381 aks	329.294 aks	Sudah Tercapai
	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)			1.918 org	2.280 org	3.040 org	3.400 org	1.918 org	1.918 org	3.040 org	3.400 org	Belum Tercapai
	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)			0 PUS	44.994 PUS	39.637 PUS	36.979 PUS	0 PUS	10.448 PUS	39.637 PUS	36.979 PUS	Belum Tercapai
	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai			0 klinik	96 klinik	96 klinik	96 klinik	0 klinik	20 klinik	96 klinik	96 klinik	Belum Tercapai

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang merupakan sebuah wilayah terluas ke dua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Letak geografis Kabupaten Malang berada di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga wilayah tersebut tergolong sangat strategis, karena berada pada pertemuan Kabupaten Pasuruan, Kediri, Blitar dan Lumajang. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar wilayah merupakan kawasan perdesaan, dengan budaya masyarakat tradisional dan paternalistik.

Berdasarkan kondisi demografi, Kabupaten Malang merupakan wilayah berpenduduk terbesar ke dua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, yaitu sebesar 2.576.596 (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) jiwa (Badan Pusat Statistik, Tabel Dinamis Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016), sehingga berimplikasi pada kompleksnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Malang.

Jika ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk dan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Malang, maka pengelolaan Program KKB harus dilaksanakan berdasarkan segmentasi sasaran, hal ini bertujuan agar pengelolaan program KKB lebih selaras dan tepat sasaran. Upaya tersebut bisa dilaksanakan, jika terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diimbangi dengan SDM pengelola program KKB yang responsif dan handal.

Pengelolaan program KKB di Kabupaten Malang bukanlah perkara mudah, hal ini disadari begitu kompleksnya permasalahan yang muncul, sekaligus menjadi penghambat capaian Visi dan Misi Kabupaten Malang **“MADEP MANTEB MANETEP”**, serta pencapaian program nasional yang tertuang dalam SPM dan SDGs. Dampak dari kondisi tersebut, adalah:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah.

Dengan rendahnya kualitas data basis kependudukan dan keluarga, akan berdampak sulitnya dalam memetakan sasaran, sehingga pembinaan program KKBPK menjadi tidak tepat sasaran.

2. Tingginya angka Drop Out KB akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tingginya angka Drop Out KB, akan berdampak pada menurunnya kepesertaan KB, meningkatkan LPP dan TFR. Penyebab utama kondisi tersebut adalah masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

3. Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun).

Perkawinan usia muda mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, hal ini disebabkan masa subur pada usia < 20 tahun lebih panjang, sehingga peluang mempunyai anak menjadi lebih besar.

4. Kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) masih rendah.

Sebagai dampak rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan KKBPK, adalah menurunnya kapasitas pembinaan program KKB. Hal ini mengingat bahwa masyarakatlah yang menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan KKBPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka program kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan secara beriringan/sejalan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas IMP mutlak diperlukan, sebab IMP merupakan wahana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pada sisi lain untuk menyikapi keterbatasan tenaga PKB/PLKB di lapangan.

5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS masih rendah.

Rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS, akan berdampak pada menurunnya pembinaan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga.

Peningkatan kuantitas dan kualitas ketahanan keluarga, merupakan bagian dari upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas, yang diwujudkan melalui media kelompok bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya, bahwa kualitas beberapa kelompok bina keluarga dan UPPKS masih belum sesuai harapan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas perlu segera diatasi, dengan memfokuskan program dan kegiatan pada upaya-upaya pemecahan masalah pembangunan KKBPK, sekaligus sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan” (**MADEP MANTEB MANETEP**). Sebagai penjabaran Visi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Misi ke 3 yaitu “Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) merupakan bagian dari upaya pokok dalam pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekaligus sebagai bagian integral pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 (Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025) tentang Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa BKKBN yang awalnya hanya menangani program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Nasional, saat ini lebih dipertegas fungsinya dalam menjalankan kebijakan kependudukan, baik dari segi kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak mungkin mampu diselesaikan secara spasial, namun diperlukan keterlibatan berbagai sektor terkait, dengan meningkatkan sinergi dan integrasi antar program. Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan komitmen *stakeholders*, agar pelaksanaan pembangunan KKBPK dapat tercapai sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan terus berusaha melakukan optimalisasi, dengan memanfaatkan sumberdaya eksisting yang dimiliki, berlandaskan pembangunan berpusat pada kepentingan dan kebutuhan, hajat hidup masyarakat (*People Centered Development*), yang dikelola secara partisipatif bersama pemerintah, masyarakat dan swasta (NGO) melalui prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Beberapa pola seperti inilah yang relevan untuk diterapkan dan mampu mengakomodir berbagai permasalahan di masyarakat (khususnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), apalagi kondisi SDM lini lapangan yang semakin berkurang. Sebagai sasaran jangka panjang diharapkan masyarakatlah sebagai ujung tombak pergerakan Program KKB.

Berdasarkan data Tahun 2018, sumberdaya manusia eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, terdiri dari: 1) PPKBD = 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) orang; 2) Sub PPKBD = 3.661 (Tiga Ribu Enam Ratu Enam Puluh Satu) orang; 3) TOMA dan TOGA sejumlah 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) orang. Namun jika ditinjau dari segi partisipasi swasta dalam pergerakan Program KKB di Kabupaten Malang, masih tergolong kecil kontribusinya dan masih terbatas pada pelayanan KB (Klinik Swasta = 36 (Tiga Puluh Enam) klinik, Dokter Praktek Swasta = 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang, Bidan Praktek Swasta = 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) orang), sedangkan partisipasi untuk kegiatan KIE masih sangat kurang. Partisipasi swasta perlu terus dibangun, sehingga tidak terbatas hanya pada pelayanan KB saja, namun juga berpartisipasi dalam kegiatan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di masyarakat.

Tantangan dan Peluang

a) TANTANGAN

1. Tingginya *Unmet Need*, yang disebabkan oleh tingginya perkawinan usia muda (< 20 tahun bagi wanita); rendahnya kesertaan ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), rendahnya kesertaan KB Pria dan tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB;
2. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif terhadap masyarakat melalui berbagai media, yang berdampak pada

terhambatnya keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

3. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
4. Rendahnya kualitas IMP akibat sering terjadi pergantian PPKBD dan Sub PPKBD dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga..

b) PELUANG

1. Adanya Sumberdaya Manusia eksternal pengelola Program KKB (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai;
2. Tersedianya tenaga dan tempat pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Semakin meningkatnya komitmen stakeholder, baik dari pemerintah dan swasta.

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah, disebabkan:
 - Rendahnya kualitas SDM pengelola pencatatan pelaporan, menurunnya frekuensi pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Masih rendahnya peserta KB MKJP, disebabkan:
 - Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan KB Non MKJP dengan berbagai alasan baik bersifat medis dan non medis, berkurangnya KIE dan konseling KB MKJP.
3. Masih tingginya Perkawinan usia muda, disebabkan:
 - Masih adanya pandangan tradisional di masyarakat untuk kawin muda, derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media (khususnya melalui media internet), masih kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi.
4. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD & Sub PPKBD), disebabkan:
 - Munculnya pandangan bahwa program KKB merupakan urusan perempuan, sering terjadinya pergantian anggota IMP, rendahnya kualitas SDM IMP karena banyak yang berusia lanjut, menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan akibat berkurangnya tenaga PKB/PLKB.

5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) rendah, disebabkan:
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pengelola kegiatan Bina Keluarga dan menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan.

Beberapa hal sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap tantangan dan peluang yang ada, yaitu:

1. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi secara periodik.
2. Perlunya peningkatan kapasitas pembinaan dan pelayanan kepesertaan ber KB untuk diarahkan menjadi peserta KB MKJP, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, khususnya bagi peserta KB Non MKJP. Hal ini disebabkan bahwa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadinya kegagalan (kehamilan), yang berakibat meningkatnya angka Drop Out (putus menjadi peserta KB).
3. Peningkatan pembinaan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK, yang dilaksanakan melalui pembinaan secara rutin dan berkesinambungan.
5. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Berdasarkan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Malang, menyatakan terdapat 9 (Sembilan) program yang harus dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan anggaran yang tersedia sejumlah Rp11.086.152.700,00 (Sebelas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dialokasikan untuk program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk;

7. Program Pelayanan Keluarga Berencana;
8. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana;
9. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Perbandingan antara RKPD Tahun 2019 dengan Analisa Kebutuhan, terdapat perbedaan besaran anggaran pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 = Rp15.365.400.000,00 dengan Hasil Analisa kebutuhan = Rp11.086.152.700,00 diperoleh selisih = Rp4.279.247.300,00. Alokasi anggaran pada setiap program/kegiatan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. Sebagai konsekuensi keterbatasan penyediaan anggaran daerah tersebut, maka diperlukan kebijakan efisiensi anggaran pada setiap pelaksanaan program/kegiatan. Beberapa program yang mengalami penurunan anggaran, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rancangan awal RKPD = Rp1.006.150.000,00; Analisa kebutuhan = Rp803.546.000,00; berkurang sebesar = Rp202.604.000,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan awal RKPD = Rp1.298.050.000,00; Analisa kebutuhan = Rp547.187.000,00; berkurang sebesar = Rp750.863.000,00.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rancangan awal RKPD = Rp12.650.000,00; Analisa kebutuhan = Rp11.495.000,00; berkurang sebesar = Rp1.155.000,00.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rancangan awal RKPD = Rp16.300.000,00; Analisa kebutuhan = Rp14.812.000,00; berkurang sebesar = Rp1.488.000,00.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rancangan awal RKPD = Rp15.250.000,00; Analisa kebutuhan = Rp13.858.000,00; berkurang sebesar = Rp1.392.000,00.
6. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
Rancangan awal RKPD = Rp1.579.400.000,00; Analisa kebutuhan = Rp1.469.839.000,00; berkurang sebesar = Rp109.561.000,00.
7. Program Pelayanan Keluarga Berencana
Rancangan awal RKPD = Rp1.473.050.000,00; Analisa kebutuhan = Rp562.409.000,00; berkurang sebesar = Rp910.641.000,00.

8. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Rancangan awal RKPD = Rp.263.950.000,00; Analisa kebutuhan = Rp5.769.874.700,00; berkurang sebesar = Rp2.494.075.300,00.

Adanya penurunan anggaran pada beberapa program tersebut, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan efisiensi anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan;
2. Melaksanakan alokasi anggaran berdasarkan prioritas program/kegiatan;
3. Mengajukan tambahan anggaran program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Terdapat satu program yang mengalami penambahan anggaran, yaitu:

- Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, Rancangan awal RKPD = Rp1.700.600.000,00; Analisa kebutuhan = Rp1.893.132.000,00; bertambah sebesar = Rp192.532.000,00. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pada program tersebut harus lebih optimal.

Perbedaan anggaran berdasarkan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan, terjadi pada setiap program/kegiatan. Penjelasan terperinci diuraikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN MALANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
2.08.01	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					
2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				15.365.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.086.152.700,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	1.006.150.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	803.546.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 01 . 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.000 buah	20.900.000,00	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.000 buah	18.992.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 01 . 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	12 bulan	24.500.000,00	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	12 bulan	24.500.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	12 ob	405.800.000,00	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	12 ob	405.800.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	4 Jumlah petugas kebersihan (ob)	12 ob	30.500.000,00	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	4 Jumlah petugas kebersihan (ob)	12 ob	27.715.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 10	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	32 jenis	46.700.000,00	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	32 jenis	42.436.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	6 jenis	27.500.000,00	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	6 jenis	24.989.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 12	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 jenis	7.500.000,00	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 jenis	6.815.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 15	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	4.400.000,00	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	3.998.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 17	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	2.400 hok	58.300.000,00	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	2.400 hok	52.977.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 18	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	125 hok	68.300.000,00	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	125 hok	62.064.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 19	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	160 hok	146.650.000,00	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	160 hok	133.260.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 20	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	29 lokasi	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (bulan)	12 bulan	165.100.000,00	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	29 lokasi	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (bulan)			
2.08 . 2.08.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	1.298.050.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	547.187.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 02 . 07	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKB	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	30.500.000,00	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKB	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	27.715.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 02 . 09	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKB	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	122.500.000,00	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKB	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	111.315.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 10	3 Pengadaan Mebeleur	DPPKB	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	15.000.000,00	3 Pengadaan Mebeleur	DPPKB	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	13.630.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 14	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKB	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	9.200.000,00	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKB	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	8.360.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 16	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	9 unit	71.500.000,00	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	9 unit	64.971.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 45	6 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	6 kec.	6 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	6 unit	934.500.000,00	6 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	6 kec.	6 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)			
2.08 . 2.08.1 . 02 . 28	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	29 lokasi	7 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	114.850.000,00	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	29 lokasi	7 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	321.196.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08 . 2.08.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	12.650.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	11.495.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 03 . 05	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPPKB	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (stel)	50 stel	12.650.000,00	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPPKB	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (stel)	50 stel	11.495.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	16.300.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	14.812.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	16.300.000,00	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	14.812.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	15.250.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	13.858.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	4 buku	10.000.000,00	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	4 buku	9.087.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 05 . 02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPPKB	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	1 buku	2.600.000,00	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPPKB	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	1 buku	2.363.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 05 . 04	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPPKB	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	1 buku	2.650.000,00	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPPKB	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	1 buku	2.408.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08 . 2.08.1 . 06	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk		Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100 %	1.579.400.000,00	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk		Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100 %	1.469.839.000,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 06 . 01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	390 Des/Kel	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	50.650.000,00	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	390 Des/Kel	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	46.025.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 06 . 02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	33 Kec.	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	28.550.000,00	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	33 Kec.	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	25.943.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	33 Kec.	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	31.450.000,00	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	33 Kec.	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	28.578.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 04	4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	DPPKB	4 Jumlah Dokumen parameter	1 dokumen	60.400.000,00	4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	DPPKB	4 Jumlah Dokumen parameter	1 dokumen	54.885.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	DPPKB	5 Jumlah Dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	65.200.000,00	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	DPPKB	5 Jumlah Dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	59.247.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 06	6 31. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	390 Des/Kel	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	851.550.000,00	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	390 Des/Kel	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	795.801.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 08	7 32. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	DPPKB	7 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	434.350.000,00	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	DPPKB	7 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	405.900.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 06 . 09	8 33. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	DPPKB	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	57.250.000,00	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	DPPKB	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	53.460.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 07	Program Pelayanan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB MKJP	38,20 %	1.473.050.000,00	Program Pelayanan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB MKJP	38,20 %	562.409.000,00	Berkurang
			Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	80,00 %				Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	80,00 %		
2.08 . 2.08.1 . 07 . 01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	33 Kec.	1 Jumlah peserta KB Aktif	315.381 akseptor	117.650.000,00	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	33 Kec.	1 Jumlah peserta KB Aktif	315.381 akseptor	106.908.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 07 . 02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.040 orang	31.250.000,00	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.040 orang	28.397.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 07 . 03	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33 Kec.	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	39.637 PUS	72.750.000,00	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33 Kec.	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	39.637 PUS	66.107.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 07 . 04	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	96 Klilik	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 Klinik	72.750.000,00	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	96 Klilik	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	66.107.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 07 . 06	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	33 Kec.	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.040 orang	169.500.000,00	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	33 Kec.	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.040 orang	158.400.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 07 . 07	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	96 Klilik	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	1.009.150.000,00	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	96 Klilik	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	136.490.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 08	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana		Persentase PPKBD Mandiri	54,10 %	8.263.950.000,00	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana		Persentase PPKBD Mandiri	54,10 %	5.769.874.700,00	Berkurang
2.08 . 2.08.1 . 08 . 01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	33 Kec.	1 Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	96.800.000,00	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	33 Kec.	1 Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	87.961.000,00	Berkurangnya anggaran disebabkan terbatasnya anggaran daerah, sehingga perlu dilaksanakan efisiensi pada setiap pelaksanaan program/ kegiatan.
2.08 . 2.08.1 . 08 . 02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	33 Kec.	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media massa	295 orang	272.800.000,00	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	33 Kec.	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media massa	295 orang	208.599.700,00	
2.08 . 2.08.1 . 08 . 03	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33 Kec.	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	72.600.000,00	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33 Kec.	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	65.971.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 08 . 04	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	33 Kec.	4 Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	4.055.400.000,00	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	33 Kec.	4 Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	3.790.060.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 08 . 05	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	33 Kec.	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	295 orang	2.449.250.000,00	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	33 Kec.	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	295 orang	386.383.000,00	
2.08 . 2.08.1 . 08 . 06	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	33 Kec.	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.317.100.000,00	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	33 Kec.	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.230.900.000,00	

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan permasalahan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dilaksanakan melalui media MUSRENBANG, dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Berbagai usulan masyarakat yang terhimpun, dijadikan sebagai bahan analisa dan sebagai program prioritas pembangunan program KKB. Mekanisme penjaringan usulan masyarakat, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga pada tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh perwakilan berbagai elemen masyarakat, antara lain: (1) Kelompok Keluarga Miskin; (2) Kelompok Perempuan; (3) Kelompok Pemuda; (4) Toma dan Toga; (5) Kader KB dan Kesehatan; (6) Kelompok Tani; (7) Kelompok Wirausaha; (8) LSM dan LSOM; (9) Kelompok profesi yang lain.

Proses pengumpulan usulan masyarakat dimulai dari tingkat paling dasar, yang diawali dari forum-forum tingkat RT. Untuk selanjutnya, usulan tersebut diajukan pada Musrenbang tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga pada Musrenbang tingkat kabupaten yang dikemas dalam aplikasi Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut, selanjutnya dipilah-pilah dan diformulasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dijadikan program prioritas.

Berdasarkan data yang terkumpul dalam aplikasi Musrenbang kabupaten Tahun 2019, tidak muncul usulan program KKB dari masyarakat. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya tergantung pada aplikasi tersebut, namun penjaringan permasalahan juga diambil dari forum konsultasi PPLKB (Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Berbagai isu-isu setrategis Program KKB, yaitu: (1) Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun); (2) Masih tingginya Drop Out KB; (3) masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD); (4) Masih rendahnya kualitas kegiatan kelompok Tri Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL); (5) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS. Kelima permasalahan itulah yang selama ini menjadi penghambat, sekaligus sebagai tantangan pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

[illegible]

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, didasarkan pada filosofi penggerakan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana, melalui strategi: (1) *Re-Establishment* yaitu dengan membangun kembali sendi-sendi Program KB Nasional sampai ke tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan; (2) *Sustainability* yaitu dengan memantapkan komitmen program yang berkesinambungan, yang didukung oleh segenap stakeholders, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Adapun tujuan nasional yang ingin dicapai, adalah: (1) Keluarga dengan jumlah anak ideal; (2) Keluarga sehat; (3) Keluarga berpendidikan; (4) Keluarga Sejahtera; (5) Keluarga Berketahanan; (6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya; (7) Penduduk tumbuh seimbang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, secara umum adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran. Sedangkan tujuan khusus dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, adalah “Menekan laju pertumbuhan penduduk”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, adalah “Meningkatnya kepesertaan ber KB”.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja Tahun 2019 lebih diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakan program KKB, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan program KKB. Sebagai penopang tujuan tersebut, implementasi kebijakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan mengalokasikan anggaran program/kegiatan secara tepat dan proporsional, berdasarkan tingkat prioritas permasalahan yang sedang dihadapi, sekaligus juga mempertimbangkan kebutuhan kegiatan Pengarus Utamaan Gender (PUG), yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Program Pelayanan Keluarga Berencana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi;
 - b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR);
 - c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi.
3. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
 - b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
 - c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana.
4. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Bina Ketahanan Remaja;
 - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	URUSAN WAJIB								
2.08.01	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA								
2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.086.152.700,00				14.222.850.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100 %	803.546.000,00			100 %	1.074.175.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPPKB	4.000 buah	18.992.000,00	DAU		4.000 buah	22.262.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	DPPKB	12 bulan	24.500.000,00	DAU		12 bulan	26.782.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	DPPKB	12 ob	405.800.000,00	DAU		12 ob	431.569.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Jumlah petugas kebersihan (ob)	DPPKB	12 ob	27.715.000,00	DAU		12 ob	33.343.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 10	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	DPPKB	32 jenis	42.436.000,00	DAU		32 jenis	50.983.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	DPPKB	6 jenis	24.989.000,00	DAU		6 jenis	30.063.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 12	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	DPPKB	10 jenis	6.815.000,00	DAU		10 jenis	8.199.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 15	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPPKB	3 jenis	3.998.000,00	DAU		3 jenis	4.721.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 17	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	DPPKB	2.400 hok	52.977.000,00	DAU		2.400 hok	61.965.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 18	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	DPPKB	125 hok	62.064.000,00	DAU		125 hok	72.649.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 19	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	DPPKB	160 hok	133.260.000,00	DAU		160 hok	156.030.000,00
2.08 . 2.08.1 . 01 . 20	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (bulan)	29 lokasi			DAK		12 bulan	175.609.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100 %	547.187.000,00			100 %	391.618.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 07	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPPKB	3 jenis	27.715.000,00	DAU		3 jenis	33.343.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 09	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPPKB	7 jenis	111.315.000,00	DAU		7 jenis	133.918.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 10	3 Pengadaan Mebeleur	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	DPPKB	2 jenis	13.630.000,00	DAU		2 jenis	16.398.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 14	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPPKB	1 gedung	8.360.000,00	DAU		1 gedung	9.789.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 16	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	DPPKB	9 unit	64.971.000,00	DAU		9 unit	76.078.000,00
2.08 . 2.08.1 . 02 . 28	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 lokasi	29 gedung	321.196.000,00	DAK		29 gedung	122.092.000,00
2.08 . 2.08.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100 %	11.495.000,00			100 %	13.466.000,00
2.08 . 2.08.1 . 03 . 05	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (stel)	DPPKB	50 stel	11.495.000,00	DAU		50 stel	13.466.000,00
2.08 . 2.08.1 . 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100 %	14.812.000,00			100 %	17.342.000,00
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	DPPKB	100 orang	14.812.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG	100 orang	17.342.000,00
2.08 . 2.08.1 . 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100 %	13.858.000,00			100 %	16.547.000,00
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	DPPKB	4 buku	9.087.000,00	DAU		4 buku	10.932.000,00
2.08 . 2.08.1 . 05 . 02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	DPPKB	1 buku	2.363.000,00	DAU		1 buku	2.783.000,00
2.08 . 2.08.1 . 05 . 04	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	DPPKB	1 buku	2.408.000,00	DAU		1 buku	2.832.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 06	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan		100 %	1.469.839.000,00			100 %	2.254.050.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 Des/Kel	390 dokumen	46.025.000,00	DAU		390 dokumen	53.866.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	33 Kec.	1 dokumen	25.943.000,00	DAU		1 dokumen	30.361.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	33 Kec.	1 dokumen	28.578.000,00	DAU		1 dokumen	33.493.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 04	4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	4 Jumlah Dokumen parameter	DPPKB	1 dokumen	54.885.000,00	DAU		1 dokumen	64.251.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	5 Jumlah Dokumen mutasi keluarga	DPPKB	1 dokumen	59.247.000,00	DAU		1 dokumen	69.369.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 06	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 Des/Kel	390 dokumen	795.801.000,00	DAK		390 dokumen	1.479.957.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 08	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	7 Jumlah dokumen parameter	DPPKB	1 dokumen	405.900.000,00	DAK		1 dokumen	461.881.000,00
2.08 . 2.08.1 . 06 . 09	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	DPPKB	1 dokumen	53.460.000,00	DAK		1 dokumen	60.872.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP		38,20 %	562.409.000,00			40,00 %	1.051.865.000,00
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)		80,00 %				89,47 %	
2.08 . 2.08.1 . 07 . 01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	1 Jumlah peserta KB Aktif	33 Kec.	315.381 akseptor	106.908.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG	329.294 akseptor	125.123.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07 . 02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	3.040 orang	28.397.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG	3.400 orang	33.244.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07 . 03	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	33 Kec.	39.637 PUS	66.107.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG	36.979 PUS	79.555.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07 . 04	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 Klilik	96 klinik	66.107.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG	96 Klinik	79.555.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07 . 06	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	3.040 orang	158.400.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG	3.400 orang	180.280.000,00
2.08 . 2.08.1 . 07 . 07	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 Klilik	96 klinik	136.490.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG	96 klinik	554.108.000,00

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didasarkan pada prioritas kebutuhan yang dialokasikan secara proporsional pada setiap program/kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (7,25%)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.992.000,00 (0,17%);
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.500.000,00 (0,22%);
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp405.800.000,00 (3,66%);
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.715.000,00 (0,25%);
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp42.436.000,00 (0,38%);
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.989.000,00 (0,23%);
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.815.000,00 (0,06%);
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.998.000,00 (0,04%);
9. Penyediaan Makanan dan Minuman, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp52.977.000,00 (0,48%);
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp62.064.000,00 (0,56%);
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp133.260.000,00 (1,20%).

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4,94%)

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.715.000,00 (0,25%);
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp111.315.000,00 (1,00%);
3. Pengadaan Mebel, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.630.000,00 (0,12%);

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.360.000,00 (0,08%);
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp64.971.000,00 (0,59%);
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp321.196.000,00 (2,90%).

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (0,10%)

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.495.000,00 (0,10%).

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (0,13%)

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.812.000,00 (0,13%).

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (0,13%)

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.087.000,00 (0,08%);
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.363.000,00 (0,02%);
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.408.000,00 (0,02%).

F. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk (13,26%)

1. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp46.025.000,00 (0,42%);
2. Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25.943.000,00 (0,23%);
3. Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.578.000,00 (0,26%);
4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp54.885.000,00 (0,50%);
5. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp59.247.000,00 (0,53%);
6. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp795.801.000,00 (7,18%);
7. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (3,66%);
8. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp53.460.000,00 (0,48%).

G. Program Pelayanan Keluarga Berencana (5,07%)

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp106.908.000,00 (0,96%);
2. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.397.000,00 (0,26%);
3. Pembinaan Kesertaan Ber-KB, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp66.107.000,00 (0,60%);
4. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp66.107.000,00 (0,60%);
5. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp158.400.000,00 (1,43%);
6. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp136.490.000,00 (1,23%).

H. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (52,05%)

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp87.961.000,00 (0,79%);
2. Komunikasi Informasi Edukasi Massa, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp208.599.700,00 (1,88%);
3. Penyuluhan Program Keluarga Berencana, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp65.971.000,00 (0,60%);
4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.790.060.000,00 (34,19%);
5. Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp386.383.000,00 (3,49%);
6. Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.230.900.000,00 (11,10%).

I. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (17,08%)

1. Bina Ketahanan Remaja, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp88.143.000,00 (0,80%);
2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp87.961.000,00 (0,79%);
3. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp154.478.000,00 (1,39%);
4. Bina Ketahanan Remaja (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp795.300.000,00 (7,17%);

5. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp656.700.000,00 (5,92%);
6. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp110.550.000,00 (1,00%).

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08	URUSAN WAJIB						
2.08.01	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA						
2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.086.152.700,00		
2.08 . 2.08.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100 %	803.546.000,00		
2.08 . 2.08.1 . 01 . 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPPKB	4.000 buah	18.992.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	DPPKB	12 bulan	24.500.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	DPPKB	12 ob	405.800.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Jumlah petugas kebersihan (ob)	DPPKB	12 ob	27.715.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 10	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	DPPKB	32 jenis	42.436.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	DPPKB	6 jenis	24.989.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 12	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	DPPKB	10 jenis	6.815.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 15	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPPKB	3 jenis	3.998.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 17	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	DPPKB	2.400 hok	52.977.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 18	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	DPPKB	125 hok	62.064.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 01 . 19	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	DPPKB	160 hok	133.260.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08 . 2.08.1 . 01 . 20	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (bulan)	29 lokasi			DAK	
2.08 . 2.08.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100 %	547.187.000,00		
2.08 . 2.08.1 . 02 . 07	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPPKB	3 jenis	27.715.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 09	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPPKB	7 jenis	111.315.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 10	3 Pengadaan Mebeleur	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	DPPKB	2 jenis	13.630.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 14	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPPKB	1 gedung	8.360.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 16	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	DPPKB	9 unit	64.971.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 02 . 28	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 lokasi	29 gedung	321.196.000,00	DAK	
2.08 . 2.08.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100 %	11.495.000,00		
2.08 . 2.08.1 . 03 . 05	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (stel)	DPPKB	50 stel	11.495.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100 %	14.812.000,00		
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	DPPKB	100 orang	14.812.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100 %	13.858.000,00		
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	DPPKB	4 buku	9.087.000,00	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08 . 2.08.1 . 05 . 02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	DPPKB	1 buku	2.363.000,00	DAU	
2.08 . 2.08.1 . 05 . 04	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	DPPKB	1 buku	2.408.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan		100 %	1.469.839.000,00		
4.01 . 2.08.1 . 06 . 01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 Des/Kel	390 dokumen	46.025.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	33 Kec.	1 dokumen	25.943.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	33 Kec.	1 dokumen	28.578.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 04	4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	4 Jumlah Dokumen parameter	DPPKB	1 dokumen	54.885.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	5 Jumlah Dokumen mutasi keluarga	DPPKB	1 dokumen	59.247.000,00	DAU	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 06	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 Des/Kel	390 dokumen	795.801.000,00	DAK	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 08	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	7 Jumlah dokumen parameter	DPPKB	1 dokumen	405.900.000,00	DAK	
4.01 . 2.08.1 . 06 . 09	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	DPPKB	1 dokumen	53.460.000,00	DAK	
2.08 . 2.08.1 . 07	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP		38,20 %	562.409.000,00		
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)		80,00 %			
2.08 . 2.08.1 . 07 . 01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	1 Jumlah peserta KB Aktif	33 Kec.	315.381 akseptor	106.908.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 07 . 02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	3.040 orang	28.397.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 07 . 03	3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	33 Kec.	39.637 PUS	66.107.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 07 . 04	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 Klilik	96 klinik	66.107.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator, Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08 . 2.08.1 . 07 . 06	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	33 Kec.	3.040 orang	158.400.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 07 . 07	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 Klilik	96 klinik	136.490.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri		54,10 %	5.769.874.700,00		
2.08 . 2.08.1 . 08 . 01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	1 Jumlah PPKBD Mandiri	33 Kec.	211 orang	87.961.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08 . 02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media massa	33 Kec.	295 orang	208.599.700,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08 . 03	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	3 Jumlah PPKBD Aktif	33 Kec.	390 orang	65.971.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08 . 04	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	4 Jumlah PPKBD Mandiri	33 Kec.	211 orang	3.790.060.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08 . 05	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media	33 Kec.	295 orang	386.383.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 08 . 06	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	6 Jumlah PPKBD Aktif	33 Kec.	390 orang	1.230.900.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna		53,46 %	1.893.132.000,00		
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB		87,10 %			
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri		45,45 %			
2.08 . 2.08.1 . 09 . 01	1 Bina Ketahanan Remaja	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	33 Kec.	21 kelompok	88.143.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09 . 02	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	33 Kec.	37.796 akseptor	87.961.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09 . 03	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	33 Kec.	45 kelompok	154.478.000,00	DAU	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09 . 04	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	21 Kec.	21 kelompok	795.300.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09 . 05	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	33 Kec.	37.796 akseptor	656.700.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG
2.08 . 2.08.1 . 09 . 06	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	33 Kec.	45 kelompok	110.550.000,00	DAK	Sudah mengakomodir PUG

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan perencanaan program dan kegiatan pada pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas data kependudukan dan keluarga berencana; 2) Peningkatan kualitas data basis kependudukan dan keluarga berencana; 3) Pendewasaan Usia Perkawinan; 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK; 5) Peningkatan dan pengembangan kegiatan ketahanan keluarga dan remaja, serta pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pertimbangan alokasi anggaran secara proporsional dan tepat sasaran, melalui pemanfaatan sumberdaya *existing* sebaik mungkin, sehingga mampu memberikan daya ungkit yang signifikan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun, untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja pada Tahun berikutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan berupaya mengajukan tambahan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

SANUSI